

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anggaran daerah dalam sistem pemerintahan merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD baik untuk wilayah provinsi atau wilayah kabupaten dan kota. Kemudian semua pengeluaran serta penerimaan Pemerintah Daerah baik dalam rupa barang, jasa, dan uang pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Pemerintah daerah dalam memberikan dana berupa bujet belanja modal di APBD buat menaikan aset tetap. Pengalokasian belanja modal didasarkan keinginan suatu daerah akan prasarana dan sarana, untuk fasilitas publik dan kesuksesan pelaksanaan tugas pemerintahan. Semua upaya tersebut di gunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemanfaatan belanja harus dialokasikan kepada hal-hal produktif, misalnya untuk melaksanakan aktivitas pembangunan, kelak penerimaan pemerintah supaya makin banyak program-program layanan publik, anggapan ini mengimplikasikan pentingnya mengalokasikan belanja demi beragam kebutuhan publik mengingat semasa ini belanja daerah lebih banyak dipakai untuk belanja teratur yang minim manfaat.

Pemerintah sudah menaikan anggaran dalam belanja modal dan pembentukan prasarana, namun bujet APBN untuk pembentukan infrastruktur masih dinilai belum mencukup, hal ini merupakan tantangan terberat dalam pembangunan prasarana di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Daerah sebaiknya bisa mengalokasikan APBD dalam belanja modal, dan tidak habis dipakai untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Di mana pemerintah mempunyai anggaran yang tidak terlalu banyak dalam APBN. Seandainya pengadaan prasarana tidak diperbanyak serta dimajukan, dan ekonomi Indonesia yang naik 6% dimasa ini, demi kesempatan investasi yang tinggi, tidak bisa mendekati hasil yang diinginkan (Setkab 2012). Oleh karena itu kecuali hal itu, kontribusi BUMN dan non pemerintah bisa bersama pemerintah dalam menyediakan infrastruktur harus diperbanyak dan ditingkatkan.

Problem yang datang ialah ketika Pemda disuguih pada besaran alokasi belanja daerah yang minim namun harus memikul keperluan banyak. Selain itu pada saat bersamaan pemda kurang mempunyai keahlian dalam manajemen APBD. Pemerintah Daerah yang sukses dalam melaksanakan pengembangan daerah dan menambah kesejahteraan rakyat tidak bisa terlepas dari kesuksesan menata APBD secara baik. Seharusnya, manajemen APBD yang kurang baik dapat membatasi kinerja pemda dalam mengembangkan pengembangan daerah serta kesejahteraan umat.

Di berlakukannya otonomi daerah melimpahi kesempatan pemerintah daerah agar lebih meluaskan daya yang di miliki oleh masing-masing daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut antara

lain terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terdiri dari (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), (3) Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Selanjutnya pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah pusat berpengaruh pula pada pertumbuhan ekonomi sebuah daerah dikarena melimpahkan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk melakukan rancangan keuangannya sendiri dan membuat peraturan yang dapat berakibat pada perkembangan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu akar pembiayaan untuk pemerintahan daerah membuat kemajuan infrastruktur daerah. Sumber PAD dihasilkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pungutan daerah, pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Semakin bagus PAD sebuah daerah diharapkan besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani 2011). Maka dari itu, pada masa desentralisasi seperti ini, pemerintah perlu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. pemerintah daerah juga dipaksa agar dapat menumbuhkan dan meningkatkan PAD setiap daerahnya.

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Penerapan desentralisasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan memberikan mandat terhadap pemerintah daerah supaya mengelola daerahnya sendiri. Bentuk desentralisasi adalah

pelimpahan dana perimbangan tersebut untuk pemerintah daerah. Dana perimbangan ini dimaksudkan agar memotong ketimpangan fiskal diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan perbedaan lebih realisasi pengeluaran dan penerimaan anggaran dalam satu periode bujet pemerintahan. SiLPA menyeluruhi pelampauan penerimaan dana perimbangan, kelebihan penerimaan PAD, kelebihan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, kelebihan penerimaan pembiayaan, kewajiban terhadap pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Terdapat hubungan yang erat antara pengalokasian belanja modal dengan SiLPA, yaitu silpa dapat di gunakan untuk menambahkan Belanja Modal pada tahun berikutnya yang dapat di pergunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian mengenai Belanja Modal dengan hasil penelitian yang berbeda pula, dalam penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Aprizay (2014) mengenai Belanja Modal menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Belanja Modal, Sedangkan SiLPA mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal, Namun dalam penelitian yang di lakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) Menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif kepada Belanja Modal.

Hasil-hasil penelitian yang belum konsisten memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal yang mengacu

pada penelitian Aprizay,dkk (2014). Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian di mana penelitian ini di lakukan di provinsi jawa tengah sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Aprizay,dkk (2014) berada di Provinsi Aceh dan tahun penelitian yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, terhadap Pengalokasian Belanja Modal, Penelitian ini akan berfokus pada pemerintah daerah yang berada didaerah Jawa Tengah yang terdiri dari sebanyak 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintahan kota.

1.2. Perumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal?
3. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang saya telitii ini adapun manfaat yang diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperkaya pengetahuan dalam hal Pengalokasian Belanja Modal pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dibidang Belanja Modal pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dimaksudkan dapat menyampaikan data dan informasi atas Pengalokasian Belanja Modal di lingkungan pemerintah daerah juga mampu mengoptimalkan daya yang ada di daerah guna memajukan daerah serta bahan kajian dari kinerja keuangan daerah tersebut. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut.